

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

Idham Noviar¹⁾, Evi Priyanti²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat
Email Koresponden : 1910631180137@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

Development planning is a step that needs to be initiated by the Government in making a development policy. The purpose of this research was to produce an analysis related to the participation of the Warung Bambu Village Community regarding a development plan in Warung Bambu Village, Karawang Regency. This study uses a qualitative method using the theory of Sarah Cook and Steve Macaulay which consists of 4 indicators, namely decision making, implementation, satisfaction, and evaluation. Participation is indispensable in development planning. In planning for participatory development there are also clear criteria, including the involvement of all stakeholders, efforts to build strong and legitimized community institutions, the existence of a political process through negotiations or deliberations which ultimately leads to the formation of collective agreements with the principle of togetherness, and efforts community empowerment through joint learning activities as part of the democratization process. The results of the research include first, the Village Government in making decisions has carried out the Village Development Planning Meeting (MusRemBang), but it is only held once a year and does not directly involve the community but only representatives of each hamlet, namely the Hamlet Head; Second, the Village Government in realizing community involvement is still lacking because there is no forum for aspirations and the Village Information System (SID) via the website is still problematic; Third advantage received by the Government in Community involvement is still very less; And the fourth evaluation in reducing community participation in development planning is still a future plan.

Keywords : Society, Planning, Development, Indulgence

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah langkah yang perlu dimulai oleh Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan. Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk melahirkan sebuah analisis terkait partisipasi yang dimiliki Masyarakat Desa Warung Bambu mengenai sebuah perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay yang terdiri dari 4 indikator yaitu pengambilan keputusan, implementasi, kepuasan, dan evaluasi. Partisipasi sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan mengenai pembangunan yang partisipatif juga terdapat kriteria yang jelas, antara lain pelibatan pemangku kepentingan, terdapat kemauan membangun sebuah kelembagaan pada masyarakat yang inklusif, legislasi, terdapat langkah politik dengan menggunakan asas musyawarah lalu melahirkan sebuah perjanjian, dan terdapat pemberdayaan bagi masyarakat dengan prinsip mengacu pada belajar untuk bersama yang menjadi aspek dari sebuah asas demokrasi. Hasil penelitian meliputi pertama, Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa, namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan Masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun; Kedua, Pemerintah Desa dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan Sistem Informasi Desa (SID) via website masih bermasalah; Ketiga keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat masih sangat kurang sekali; Dan keempat evaluasi dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih sebuah rencana kedepan.

Kata Kunci : Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan, Partisipasi

1. Pendahuluan

Perencanaan membangun sebuah pedesaan desa menjadi langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi pemerintah untuk menciptakan gambaran tentang apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang sudah diinginkan. Nur, dkk (dalam Ningsih 2023), bahwa desa adalah sebuah bagian yang paling bawah untuk tingkatan daerah otonom serta memiliki sebuah instansi pemerintahan dan berperan penting dalam pembangunan.

Aparatur tingkat desa merupakan bagian dari aparatur penyelenggara negara, yang memiliki daftar tanggung jawab negara seperti mengelola instansi pada sebuah desa, melaksanakan serangkaian program untuk pembangunan kedepan dan memberikan sebuah pelayanan untuk kebutuhan administrasi penting yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat pedesaan dengan prinsip adil untuk semua. (Tara, 2022). Pada tahap bagian rencana, anggaran, implementasi dan sebuah kewajiban dalam tanggung jawab, pemerintah pada sebuah desa wajib mengajak serta berkolaborasi dengan masyarakat pada desanya dengan diwakili instansi BPD, untuk menyusun program untuk kerja dan menjadwalkan sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat di desanya, lalu sesuai atas kemampuan yang dimiliki oleh desanya. (Goni, et al., 2023). Sebesar apapun jumlah uang yang dikerahkan dan dialokasikan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran, jika pengeluaran publik tidak ditujukan untuk mendorong perekonomian dan menyediakan barang publik, maka tidak akan membawa manfaat yang maksimal (Sutrisna, 2023).

Guna meraih tujuan pada sebuah pembangunan yang efisien serta efektif, diperlukan rencana yang berbasis partisipatif dengan mengikutsertakan setiap masyarakat pada langkah penilaian pembangunan, serta manfaat yang dilahirkan dapat menjadi satu kesatuan. Sastropoetro (dalam Sungi, 2023) memberikan pendapatnya tentang partisipasi, yaitu keterlibatan mental atau pemikiran dan emosional seseorang dalam situasi kelompok guna mendorongnya untuk berperan serta berkontribusi pada tim dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab kepada institusi yang bersangkutan.

Keterarikan dan perhatian terhadap penggunaan langkah rencana yang berbasis partisipatif dalam setiap Pemerintahan sangat dibutuhkan atau penting untuk masyarakat, langkah yang berfokus untuk kepentingan atau kebutuhan bagi publik secara luas, partisipasi (involvement), dinamisme, sinergi, legitimasi dan kemudahan (praktis). Pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rencana untuk pembangunan bagi desa dapat terlaksana melalui kolaborasi yang baik terhadap masyarakat di desanya. Kemudian dalam Undang – Undang tersebut dalam ayat 2, guna merencanakan pembangunan yang efisien di sebuah desa, perangkat desa diharuskan

memiliki kewajiban melakukan sebuah langkah musyawarah yang bertujuan untuk melahirkan rencana perihal pembangunan kedepan di desa. Peraturan perundang-undangan perihal desa merupakan salah satu tanda kemauan politik yang dilakukan pemerintah guna melahirkan sebuah kemajuan substansial dalam meraih kesejahteraan berasas keadilan, kebahagiaan, dan rangkai pemberdayaan untuk masyarakat, serta memacu mobilitas dan keikutsertaan masyarakat di pedesaan (Yasir, 2023). UU Desa menempatkan desa sebagai andalan pembangunan di Indonesia (Waruwu, dkk., 2023).

Lalu, pembangunan yang memiliki rencana yang melakukan kolaborasi masyarakat memiliki ciri - ciri mencakup pelibatan pemangku kepentingan, terdapat kemauan membangun sebuah kelembagaan pada masyarakat yang inklusif, legislasi, terdapat langkah politik dengan menggunakan asas musyawarah lalu melahirkan sebuah perjanjian, dan terdapat pemberdayaan bagi masyarakat dengan prinsip mengacu pada belajar untuk bersama yang menjadi aspek dari sebuah asas demokrasi. Pembangunan yang dilakukan pada masyarakat pedesaan tidak hanya pembangunan yang ditujukan untuk membangun prasarana, sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia khususnya masyarakat pedesaan desa dengan memberdayakan masyarakat (Hermawan, 2023).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Warungbambu, terdapat penyimpangan dalam hal musyawarah untuk pembangunan di desa karena masih menerapkan pendekatan *top-down planning* yang kuat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak memperkuat kepentingan penduduk, padahal tingkat keberhasilan partisipasi diukur dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi pada rencana, pelaksanaan serta penggunaan program dalam sebuah pembangunan kedepan.

Partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat dalam sebuah penerapan pembangunan di desa belum optimal, padahal perangkat desa atau kepala desa sangat penting guna mengarahkan masyarakat untuk memiliki motivasi yang maju untuk berkolaborasi pada pembangunan di desanya yang dipimpin. Guna mengacu pada partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakatnya, perangkat atau aparatur di sebuah desa berkewajiban melahirkan sinergi pada rencana kegiatan dengan selalu memperhatikan etika sosial. Dengan itu, peaksanakan kegiatan sebuah pembangunan bisa menjamin kesejahteraan bagi masyarakat luas serta dapat menghadirkan partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan kedepan di desa.

Penelitian sebelumnya yang terkait pada pembahasan penelitian yaitu pertama, penelitian Ningsih Widiya yang berjudul “PENGARUH PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi yang berbasis kolaborasi masyarakat desa Pancuran Gading terkait pembangunan di desanya dominan masih berdasarkan kegiatan pemerintah serta partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat masih digalang pemerintah di desanya atau masih mencari masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi; Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ecin Sante, Vecky A.J Masinambow, dan Jacline I. Sumual yang berjudul “ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Manangu Kabupaten Boalemo)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan memiliki dampak positif namun tidak berpengaruh pada pembangunan kedepan di desa, sehingga ketika kolaborasi masyarakat di perencanaan mengalami kenaikan maka diikuti dengan meningkatnya kinerja/proses dari pembangunan desa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Skolastika Desinta yang berjudul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA MANDIRI MELALUI USAHA KECIL MENENGAH (Studi di UD Tohu Srijaya, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)” ditemukan hasil penelitian yaitu partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat untuk penerapan pembangunan kedepan desa mandiri dengan memanfaatkan UMKM di Ud Tohu Srijaya cukup baik, masyarakat berkolaborasi pada langkah pengambilan sebuah keputusan, namun faktor penghambatnya adalah rendahnya pendidikan yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan teknologi modern, dimana masyarakat belum memiliki keterampilan mengenai dunia modern, dan masalah Covid-19 yang menyebabkan penurunan pemasaran produk yang mereka jual; Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rego Bobby Afrionaldy dan Rina Martini yang berjudul “TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YANG TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Tahun 2021” ditemukan hasil penelitian yaitu gaya kepemimpinan yang dimiliki kepala desa Yan Teguh Wibowo guna menciptakan sebuah peningkatan partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kedepan di desa Ngale memiliki tipe kepemimpinan yang demokratis, tetapi kekurangan yang dimilikinya yaitu kepala desa saat memberikan sosialisasi perihal pentingnya sebuah pembangunan di desanya masih diwakilkan kepala dusun; Dan kelima, penelitian Yosua Lumingkewas, Ventje Kasenda, dan Neni Kumayas yang berjudul “Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa” ditemukan hasil penelitian yaitu Peran Organisasi masyarakat Rukun Tetangga Malawe guna mempertegas rencana pembangunan kedepan dengan berfokus atas masalah

serta semua kebutuhan yang menimpa masyarakat perlu mengacu pada aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis memiliki karakteristik terbaru sebagai membedakan atas hasil yang telah ditemukan pada penelitian sebelumnya meliputi objek pada penelitian ini dilakukan di Desa Wanasari Kabupaten Karawang, dan penelitian ini menggunakan konsep teori partisipasi Cohen dan Uphoff (dalam Safitri,dkk., 2022) sebagai alur berfikir dalam menganalisa mengenai partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan di desa Warung Bambu Kabupaten Karawang yakni:

Pertama, pengambilan Keputusan merupakan aspek yang berkaitan dengan mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan masyarakat mengenai ide atau gagasan yang berhubungan dengan kebaikan bersama. Kedua, implementasi merupakan aspek pengerahan sumber daya keuangan dan kegiatan administratif pada sebuah ketetapan rencana, mengenai rencana, implementasi ataupun tujuannya.

Terakhir, kepuasan merupakan aspek kinerja yang dicapai baik secara tulisan maupun angka. Keempat, evaluasi merupakan aspek perbaikan pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya, serta untuk memahami capaian pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Penelitian ini mengacu atas metode deskriptif melalui pendekatan yang berbasis penelitian yang kualitatif. Langkah penelitian yang kualitatif merupakan langkah penelitian berbasis post positivism, untuk menganalisa atas suasana lapangan yang asli terjadi. Langkah penelitian memiliki maksud untuk memberikan sketsa perihal bagaimana pelaksanaan yang terjadi selama partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Akhirnya dapat mengetahui partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat berjalan dengan semestinya atau gagal.

Penggunaan sumber data untuk membantu penulis yaitu data primer dan data sekunder yang didapat melalui para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, meliputi: data primer didapat melalui pelaksanaan observasi peneliti dan pelaksanaan wawancara informan perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Data sekunder didapat melalui buku sastra, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah serta berita di media online perihal dengan isu-isu terkait dengan partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Data yang dikumpulkan wawancara perihal partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Kedua, Observasi Desa Warung Bambu untuk mengamati partisipasi berbasis kolaborasi masyarakat pada rencana pembangunan kedepan desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang; Ketiga, penulis mendokumentasi.

Teknik analisis penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis kegiatan dalam proses penelitian seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (dalam Khikmah, 2020), yang pertama, meliputi minimalisasi (reduksi) data, yaitu agregasi data yang diperoleh kemudian mengidentifikasi data untuk penelitian ini dengan klasifikasi yang ada. Sementara data yang kurang relevan dikecualikan. Data yang relevan terkait dengan masalah utama yang diidentifikasi; Kedua, data display atau penyajian data, yaitu penyajian berbagai informasi data yang telah dianalisis untuk memberikan gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari penelitian yang dilakukan; dan Ketiga, menarik kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal sebagai langkah awal untuk menarik kesimpulan akhir dari penelitian ini.

2. Pembahasan

Kondisi pengambilan keputusan dalam partisipasi berbasis kolaborasi Masyarakat Desa Warung Bambu terkait perencanaan sebuah pembangunan kedepan Di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Pengambilan keputusan merupakan sebuah aspek partisipasi yang berkaitan dengan penetapan suatu kebijakan atau hasil kesepakatan. Keputusan yang baik berlandaskan atas aspirasi masyarakat, sehingga tujuan yang ingin dilakukan dapat sesuai dengan Masyarakat dan Bersama. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Pemerintah di Desanya dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa. Namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak melibatkan Masyarakat secara merata.

Kepuasan Masyarakat Desa Warung Bambu dalam pengambilan keputusan masih terbilang kurang puas. Sebab, kurangnya wadah aspirasi dalam menampung aspirasi kritik dan saran, sehingga Masyarakat merasa pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Pengambilan keputusan di lingkungan desa yang baik, perlu memiliki sebuah kinerja organisasi pemerintah yang baik pada ruang lingkup pemerintah desanya. Kinerja atau dalam Bahasa Inggris "*Performance*" merupakan sebuah proses mengubah sebuah energi menjadi sebuah nilai, serta semua proses

yang terjadi pada ruang lingkup manajemen (Ndraha dalam Samangun, dkk., 2023). Kemudian, menurut Gibson (dalam Samangun, dkk., 2023) kinerja yaitu sebuah hasil atas pelaksanaan pekerjaan terkait tingkat pencapaian tujuan instansi atau organisasi, tingkat efisiensi, dan keefektifan dari pelaksanaan pekerjaan lainnya.

Dengan adanya kinerja yang baik dari organisasi pemerintah desa membuat pengambilan keputusan dalam hal partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik pula tanpa adanya hambatan serta konflik yang timbul dalam pelaksanaannya.

Partisipasi dari masyarakat atas pengambilan keputusan yakni sebuah sikap paling utama dalam menghasilkan sebuah aturan atau kebijakan dengan memberikan sebuah peluang atau kontribusi yang maksimal dari masyarakat untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Aji, dkk., 2022). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, sebab akan memberikan sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan menciptakan keterlibatan secara aktif selalu masyarakat dalam hal diskusi maupun rapat dalam musyawarah pada desa.

Selanjutnya, pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara langsung memerlukan sebuah penentuan alternatif dengan seluruh lapisan masyarakat agar menghasilkan sebuah kesepakatan perihal kepentingan bersama maupun perencanaan bersama (Cohen dan Uphoff dalam Safitiri, dkk., 2022). Kaho (dalam Aji, dkk., 2022) menyatakan bahwa perwujudan atas lahirnya sebuah partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan yakni ikut aktif dalam memberikan pemikirannya maupun gagasan dalam sebuah wadah aspirasi, turut hadir dalam lingkup diskusi, dan memberikan masukan maupun saran atas kebijakan atau program yang telah dilaksanakan.

Pembangunan yang berlandaskan asas partisipasi masyarakat tentunya akan memberikan sebuah capaian yang sesuai atas keinginan Masyarakat serta tidak hanya memuaskan kelompok atau individu saja. Diperlukan sebuah sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa Warungbambu Kabupaten Karawang dengan Masyarakat Desa Warungbambu Kabupaten Karawang untuk meraih pembangunan yang memberikan dampak positif serta memberikan kemajuan atas desanya. Apabila pembangunan dapat berjalan dengan baik, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan pula bagi masyarakatnya serta Masyarakat juga akan puas dengan pengambilan keputusan atas aspirasinya.

Pengambilan keputusan merupakan sebuah bagian dari asas demokrasi yang harus ditanamkan dalam ruang lingkup Pemerintahan Desa, sebab dengan adanya pengambilan keputusan yang berkolaborasi dengan Masyarakat tentunya mewujudkan sebuah transparansi serta keterbukaan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa, dan Masyarakat pun dapat mempercayai setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan Pemerintah Desa tanpa adanya unsur kepentingan yang dapat merugikan Masyarakat Desa.

Demi kemajuan pembangunan desa yang baik, keputusan bersama menjadi sebuah kunci atas keberhasilan – keberhasilan yang lahir dalam pembangunan Desa, sehingga Masyarakat Desa dapat hidup sejahtera tanpa harus menelan kepahitan atas kepentingan para Pejabat Pemerintah Desa.

Pengimplementasian partisipasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Implementasi merupakan aspek selanjutnya pada partisipasi yang sangat penting dan berkaitan dengan perwujudan nyata. Implementasi dalam partisipasi yang baik berdasarkan terpenuhinya kebutuhan Masyarakat yang diwujudkan dalam langkah baik dan fakta. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Implementasi dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan masih dalam prosesnya pelayanan yang efisien, cepat, dan berbasis *online* menjadi faktor kurang pedulinya Masyarakat terhadap Pemerintah, seperti Sistem Informasi Desa (SID) via *website* masih bermasalah.

Implementasi terkait keterlibatan secara langsung dalam perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu masih sangat kurang, sebab komunikasi yang diberikan pemerintah untuk turun ke Masyarakat sangat kurang. Tahap implementasi dalam partisipasi menjadi sebuah langkah yang sangat berpengaruh atas pembangunan yang mementingkan aspirasi masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan individu atau kelompok, sehingga hasil dari pembangunan dapat memuaskan Masyarakat serta tidak menyengsarakan Masyarakat. Kemudian, pada tahap pelaksanaan merupakan sebuah komponen yang cukup penting dan dapat mengukur tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik atau tidak (Safitri, dkk., 2022). Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) menyatakan bahwa partisipasi dalam implementasi atau pelaksanaan membutuhkan sebuah unsur atau seluruh lapisan masyarakat dalam hal menggerakkan sumber daya serta dana atas pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dilihat program pembangunan yang dijalankan berhasil atau tidak.

Partisipasi Masyarakat atas sebuah implementasi atau pelaksanaan berupa gotong – royong, berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan, melaksanakan kerjabakti, serta sebagai pengumpul informasi untuk dapat disebarluaskan pada media sosial. Partisipasi Masyarakat desa dalam pembangunan desa sangatlah penting, sebab pembangunan yang berbasas demokrasi memerlukan sebuah keikutsertaan Masyarakat desa didalamnya. Apabila Masyarakat desa tidak terlibat langsung dalam pembangunan di desa tentunya pembangunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat serta tidak

lahirnya sebuah transparansi kepada masyarakat desa.

Dalam menciptakan implementasi yang berlandaskan partisipasi dengan berbasas demokrasi harus memiliki empat prinsip pokok atas demokrasi yang berdasarkan hukum. Menurut Asshidiqie (dalam Widodo, dkk., 2023) empat prinsip demokrasi atas hukum meliputi menjamin kesetaraan lalu menjamin juga kesetaraan dalam hidup di berbagai hal; Kedua mengakui dan menghormati seluruh perbedaan yang muncul atau pluralitas; Ketiga, Seluruh aturan yang bersifat mengikar dimanfaatkan untuk sumber referensi bersama; Dan keempat, dalam menyelesaikan perselisihan menggunakan sistem peraturan yang diakui bersama.

Pemerintah desa sangat penting memberikan sebuah wadah kepada para masyarakat desa untuk dapat memberikan tenaga serta pikiran pada implementasi pembangunan. Sebab, agar melahirkan sebuah hasil pembangunan yang menguntungkan masyarakat desa dan memberikan keterbukaan atas segala sesuatu yang terjadi selama pembangunan

Apabila Pemerintah desa sudah sangat dekat dengan masyarakat dalam hal pembangunan, tentunya permasalahan seperti korupsi, dan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan tidak akan terjadi, serta pembangunan desa akan mengarah pada kemajuan. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat desa akan terjamin juga jika pembangunan yang dijalankan memberikan wadah masyarakat untuk berperan aktif didalamnya.

Keuntungan dalam partisipasi Masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Keuntungan merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan penerimaan positif yang tidak merugikan. Keuntungan tidak mudah didapatkan sebab perlunya sebuah proses yang diberikan harus baik dan mengurangi kerugian-kerugian yang terjadi. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlibat cukup namun masih sangat kurang sekali. Pemerintah Desa masih berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang berlandaskan partisipasi Masyarakat.

Masyarakat Warung Bambu belum juga dapat menerima keuntungan terkait fasilitas dan pelayanan dari Pemerintah Warung Bambu. Kepuasan yang buruk Masyarakat membuat Masyarakat kurang peduli terhadap Pemerintah dalam perencanaan pembangunan, perlunya memperbaiki kedekatan dengan Masyarakat

Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) Partisipasi yang melahirkan sebuah keuntungan tentunya memerlukan sebuah hasil yang memberikan manfaat dan berkualitas, serta tingkat

keberhasil dilihat dari segi kuantitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah faktor pendukung atas partisipasi masyarakat. Menurut Hendrawati Hamid (dalam Safitri, dkk., 2022) faktor pendukung atas partisipasi meliputi terdapat unsur kesempatan dalam lingkungan kehidupan untuk memberikan peluang berkontribusi; Kedua, terdapat kemauan atau motivasi untuk melahirkan rasa semangat dalam turut serta berkontribusi yang dimana terdapat manfaat yang dapat dirasakan; Dan ketiga, terdapat kemampuan atas kesadaran pada diri sendiri bahwa dapat mampu untuk berkontribusi dan hal tersebut dapat berupa pikiran, waktu, tenaga serta material lainnya. Kepuasan dalam partisipasi tidak terlepas atas kualitas maupun kuantitas dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Aji, dkk., 2022). Apabila pembangunan yang dihasilkan memberikan manfaat positif maka kepuasan masyarakatpun dapat lahir. Sebaliknya, jika hasil pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat maka kemungkinan tidak akan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pembangunan desa yang melahirkan sebuah kepuasan bagi masyarakat desa membutuhkan sebuah sinergitas antara seluruh *stakeholder* Pemerintah desa dengan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan adanya sinergitas tersebut, tentunya akan memberikan sebuah Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Apabila pembangunan desa dirasa melahirkan kepuasan masyarakat desa, tentunya infrastruktur desa dapat mengarah pada peningkatan serta dapat memberikan banyak keuntungan agar dapat mendorong desa menjadi desa yang maju.

Desa yang maju memerlukan sebuah sarana dan prasarana serta pelayanan masyarakat yang berkualitas. Hal tersebut menjadi pembeda dengan desa yang tidak maju. Desa yang tidak maju tentunya memiliki sara dan prasarana yang tidak baik, pelayanan masyarakat sangat tidak profesional, serta tidak adanya kepuasan yang timbul dalam partisipasi masyarakat desa. Desa maju memberikan kesejahteraan masyarakat yang baik dan terus meningkat, sebab masyarakat desa disajikan dengan beberapa sarana atau infrastruktur yang memadai seperti jalan yang baik dan infrastruktur yang memadai seperti pada bidang Kesehatan yakni memiliki posyandu dan dokter yang profesional, bidang sosial yakni terdapat pasar yang bersih, bidang agama yakni terdapat sarana beribadah untuk seluruh agama seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah agama lainnya, dan bidang Pendidikan yakni akses jalan menuju sekolah yang baik dan tidak menyulitkan murid.

Apabila semua sarana maupun prasarana telah terpenuhi dalam segala bidang, maka dapat melahirkan sebuah kesejahteraan masyarakat yang memberikan banyak kepuasan atas kinerja pemerintah desa yang bekerja dengan penuh semangat membangun desa. Berbeda dengan desa yang tidak memiliki berbagai sarana maupun prasarana di berbagai bidang, tentunya masyarakat desa tidak akan merasakan manfaat serta tidak adanya kepuasan yang lahir dalam pembangunan. Pemerintah desa seakan mementingkan kepentingan

kelompok maupun pribadinya. Pemerintah yang mementingkan kelompok maupun pribadi merupakan sebuah pemerintahan yang tidak berasas demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat tidak akan menjadi sebuah acuan. Pembangunan desa yang dipimpin oleh pemerintah dengan tidak berasas demokrasi akan memberikan sebuah ketidakmajuan dalam hal sarana maupun infrastruktur di desa.

Pengevaluasian ketika terjadi penurunan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat pada perencanaan pembangunan kedepan di Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang

Evaluasi merupakan aspek yang berkaitan dengan perbaikan permasalahan yang timbul. Evaluasi sangat diperlukan dalam hal meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Evaluasi merupakan kunci dalam menerapkan perubahan yang baik. Pada Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang, Evaluasi terhadap penurunan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih baru menjadi sebuah rencana dan belum dilaksanakan terkait evaluasi penurunan partisipasi seperti pembuatan pelayanan sistem online dan peningkatan fasilitas yang masih diproses atau direncanakan Masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Evaluasi Pemerintah di Desa pada kemajuan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat pada perencanaan pembangunan kedepan masih belum ada perubahan yang signifikan dan inovasi belum menguntungkan masyarakat, serta tidak terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat di Desanya.

Menurut Cohen dalam Uphof (dalam Safitri, dkk., 2022) Partisipasi dalam evaluasi berkaitan atas pelaksanaan yang dilakukan secara menyeluruh dan bertujuan mengetahui keberhasilan program. Masyarakat sangat penting dalam hal melakukan pengawasan atas evaluasi yang terjadi.

Rapat evaluasi menjadi sebuah wadah yang dilakukan pemerintah desa untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait keberhasilan dan kegagalan dalam kebijakan pembangunaa, kemudian memberikan sebuah sosialisasi terkait bentuk fisik atas kebijakan infrasturktur maupun sarana dalam pembangunan yang telah dilakukan (Aji, dkk., 2022). Evaluasi menjadi sebuah pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah desa dalam membuat sebuah laporan pertanggung jawaban untuk dapat disampaikan pada masyarakat desa.

Pemerintah desa yang berasas demokrasi tentunya memberikan sebuah wadah untuk penyampaian terkait keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk dapat mengawal jawannya pembangunan desa.

Evaluasi sangat penting dalam hal pembangunan, sebab untuk menjadi tolak ukur atas kelebihan dan kekurangan kemampuan pemerintah desa. Evaluasi perlu melahirkan sebuah kebijakan pembangunan yang mengarah pada kemajuan dengan berkolaborasi pada

aspek teknologi seperti media sosial atau internet. Sehingga pembangunan yang dijalan tidak hanya selalu begitu saja dan tidak ada perubahan. Pemerintah desa harus memberikan sebuah inovasi yang baru dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat memberikan kemajuan bagi desa serta masyarakat dapat mendapatkan keuntungan yang baik dalam pembangunan yang terjadi pada desa yang dihidupinya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang”, kesimpulannya pada pengambilan keputusan, Pemerintah di Desa terkait pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan sudah menjalankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRemBang) Desa. Namun hanya dilakukan setiap satu tahun sekali dan tidak melibatkan Masyarakat secara langsung melainkan hanya perwakilan setiap dusun yaitu Kepala Dusun. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara konsisten dan tidak melibatkan Masyarakat secara merata. Kepuasan Masyarakat Desa Warung Bambu dalam pengambilan keputusan masih terbilang kurang puas.

Kedua pada aspek implementasi, Pemerintah Desa dalam mewujudkan keterlibatan Masyarakat yang baik dalam perencanaan pembangunan masih kurang sebab tidak adanya wadah aspirasi dan masih dalam prosesnya pelayanan yang efisien, cepat, dan berbasis *online* menjadi faktor kurang pedulinya Masyarakat terhadap Pemerintah, seperti Sistem Informasi Desa (SID) via website masih bermasalah. Komunikasi Pemerintah untuk turun ke Masyarakat sangat kurang; Ketiga pada aspek keuntungan, Keuntungan yang diterima Pemerintah dalam keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlibat cukup, namun masih sangat kurang sekali. Pemerintah Desa masih berupaya untuk memberikan peningkatan pelayanan dan fasilitas untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang berlandaskan partisipasi Masyarakat. Masyarakat Warung Bambu belum juga dapat menerima keuntungan terkait fasilitas dan pelayanan dari Pemerintah Warung Bambu.

Keempat pada aspek evaluasi, evaluasi dalam penurunan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih baru menjadi sebuah rencana dan belum dilaksanakan terkait evaluasi penurunan partisipasi seperti pembuatan pelayanan sistem online dan peningkatan fasilitas yang masih diproses atau direncanakan masyarakat terhadap rencana pembangunan kedepan. Evaluasi Pemerintah di Desanya perihal kemajuan partisipasi berasas kolaborasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih belum ada perubahan yang signifikan dan inovasi belum dapat dirasakan oleh masyarakat

Daftar Pustaka

- Afrionaldy, R. B. (2023). TIPE KEPEMIMPINAN KEPALA DESA YANG TEGUH WIBOWO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 532-545.
- Agustin, M., & Rahaju, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(3).
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135-142.
- Desinta, S. K. O. L. A. S. T. I. K. A., Adiwidjaja, I., & Romi, M. N. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Mandiri Melalui Usaha Kecil Menengah (Studi di UD Tohu Srijaya, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Goni, K. M., Lopian, M. T., & Egeten, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(1).
- Hermawan, E. (2023). Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Partisipatif Membawa Pembangunan Pada Masyarakat Desa. *Distingsi: Journal of Digital Society*, 1(2), 12-17.
- Khikmah, H. (2020). *Analisis Tingkat Konsentrasi Belajar Dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari Hasil Belajar Siswa Kelas V Umar Bin Khattab SDIT Qurrota A'yun Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Lumingkewas, Y., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2023). Partisipasi Rukun Tetangga Mawale (RTM) Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*, 3(1).

- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200.
- Mustanir, A., Fariad, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 304-313.
- Sante, E., Masinambow, V. A., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi: Desa Tabulo Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(1), 109-120.
- Sungi, G. (2023). PENGARUH PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. *Cross-border*, 6(1), 159-184.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(1), 7-15.
- Sutrisna, I. W. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PARTISIPATIF DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI ANGGARAN DI DESA. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 85-94.
- Tara, A. L., Suprojo, A., & Setiamandani, E. D. (2023). *Strategi Komunikasi Aparatur Desa Pada Pembangunan Menuju Desa Mandiri* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Waruwu, H. A., Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 161-170.
- Widiya, N. (2023). *PENGARUH PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Widodo, A., Kurniawan, RC, & Maryanah, T. (2023). Permasalahan keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8 (1).
- Yasir, M., & Munawaroh, W. S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 330-340.